

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen mitigasi bencana banjir di Desa Kedunggempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto belum terlaksana secara optimal. Mitigasi struktural telah dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan tanggul, namun sifatnya belum permanen dan belum didukung oleh infrastruktur tambahan seperti rumah pompa. Di sisi lain, mitigasi non-struktural mencakup beberapa aspek yang belum menyentuh seluruh masyarakat secara merata.

Secara umum, kerangka hukum telah diterapkan dengan baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan mitigasi. Namun, pemberian insentif, pelatihan dan pendidikan, pembangunan kelembagaan, serta sistem peringatan dini masih belum berjalan secara maksimal. Kegiatan mitigasi lebih banyak dilaksanakan secara reaktif dan bersifat sporadis, dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi namun tidak didukung secara memadai oleh pemerintah daerah dalam hal fasilitasi dan pendampingan teknis. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan lapangan dan kebijakan yang berlaku. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga BPBD belum dapat merealisasikan program penting seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Kedunggempol. Program Destana yang

seharusnya dapat menjadi fondasi kelembagaan dalam mitigasi berbasis komunitas, hingga saat ini masih tertunda pelaksanaannya.

Masyarakat Desa Kedunggempol menunjukkan kesadaran terhadap risiko banjir, terutama di dusun yang paling terdampak seperti Balongcangak. Namun, kesadaran tersebut belum dibarengi dengan sistem penanggulangan yang terstruktur, baik dalam bentuk program edukatif berkelanjutan maupun sistem peringatan dini berbasis teknologi. Kegiatan mitigasi agrikultural juga belum menjadi perhatian utama dalam strategi pengurangan risiko bencana di desa ini. Secara keseluruhan, manajemen mitigasi bencana banjir di Desa Kedunggempol masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi kebijakan, implementasi, pengawasan berlapis, hingga keterlibatan lintas sektor.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BPBD Kabupaten Mojokerto, antara lain:

1. Perluasan implementasi program destana pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Mojokerto perlu segera merealisasikan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Kedunggempol. Pembentukan lembaga tangguh bencana tingkat desa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas lokal dan membentuk sistem penanggulangan bencana yang lebih mandiri dan terstruktur.
2. Penguatan infrastruktur mitigasi struktural tanggul yang saat ini telah diperbaiki secara darurat harus segera ditingkatkan menjadi bangunan permanen dengan material yang tahan terhadap tekanan air tinggi. Selain itu, pembangunan rumah

pompa dan sistem drainase yang efektif sangat diperlukan guna mendukung pengendalian banjir secara teknis.

3. Peningkatan pelatihan dan edukasi masyarakat BPBD perlu secara aktif melaksanakan pelatihan kebencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Simulasi evakuasi, pendidikan di sekolah, serta pembentukan kader siaga bencana menjadi langkah penting untuk membangun budaya sadar bencana di tingkat akar rumput.
4. Pengembangan sistem peringatan dini (EWS), meskipun metode tradisional seperti kentongan dan pengeras suara masih digunakan, diperlukan integrasi sistem peringatan dini berbasis teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, misalnya sensor longsor pada tanggul. Ini akan meningkatkan kecepatan dan keakuratan respons masyarakat terhadap ancaman banjir.
5. Pemberian insentif mitigasi bagi masyarakat dan swasta, pemerintah daerah disarankan untuk merancang skema insentif seperti bantuan bahan bangunan, subsidi pertanian adaptif, atau penghargaan bagi masyarakat dan perusahaan yang aktif dalam kegiatan mitigasi banjir. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan kolaborasi lintas sektor.
6. Penyediaan alat evakuasi bencana banjir seperti perahu karet, pelampung, dan senter darurat, guna mendukung proses evakuasi yang cepat dan aman, khususnya bagi kelompok rentan. Selain itu, perlu disiapkan tempat evakuasi yang lebih layak dan strategis, seperti bangunan bertingkat atau balai desa yang telah dilengkapi dengan fasilitas dasar (air bersih, sanitasi, logistik awal). Penyediaan fasilitas ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan

masyarakat, meminimalkan risiko saat banjir, dan memperkuat mitigasi bencana di tingkat desa.

7. Integrasi pendekatan agrikultural dalam mitigasi, meskipun wilayah Desa Kedunggempol didominasi lahan persawahan, pendekatan agrikultural seperti pemanfaatan tanaman penahan air atau sistem irigasi adaptif dapat mulai diterapkan. Pendekatan ini perlu dikembangkan secara kolaboratif antara pemerintah, petani, dan institusi riset.